

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kawasan Timur Tengah merupakan kawasan yang terdapat berbagai negara-negara dengan kekuatan utama dalam sektor militer seperti Irak, Iran, Israel dan Turki, juga sektor ekonomi yang bertumpu pada penghasilan minyak, seperti Arab Saudi, Iran, Irak dan Kuwait. Negara di Timur Tengah berkembang menjadi sebuah pusat budaya yang kental dengan bangsa-bangsa Arab dan Persia karena pengaruh dari sejarah kedua budaya. Selanjutnya, negara-negara di Timur Tengah rawan mengalami konflik antar negara dalam kawasan maupun di luar kawasan. Dalam konteks politik, negara di kawasan Timur Tengah ini terdapat beberapa poros politik, dan beberapa hubungan diplomasi antar pemerintahan dalam berbagai bidang.

Gambar 1.1. Peta Letak Kawasan Timur Tengah



Sumber: *Geology.com*

Kawasan Timur – Tengah sangat menarik dibahas dalam kancah dunia Internasional, tidak terkecuali untuk studi Ilmu Hubungan Internasional. Khususnya tema hubungan bilateral antar negara kawasan Timur – Tengah yang

memiliki jejak historikal cukup dekat sejak zaman sebelum masehi. Hubungan bilateral antara Turki dan Israel menyimpan permasalahan – permasalahan api kecil historis maupun politik kedua negara. Kedua negara ini cukup unik karena pada faktanya sangat berbeda pandangan dalam hal ideologi dan kepentingan nasional, namun dapat menjalin hubungan bilateral.

Turki merupakan salah satu negara di kawasan Timur Tengah yang memiliki kekuatan cukup besar dan berpengaruh di kawasan tersebut. Pada posisinya, Turki memiliki kekuatan geopolitik yang menguntungkan karena dekat dengan kawasan Eropa, Asia dan Timur Tengah sehingga dalam menjalankan urusan kenegaraan, Turki pasti akan terlibat berbagai isu baik regional maupun internasional.¹ Apabila membahas Turki dan Israel, kedua negara tersebut ternyata memiliki hubungan diplomatik yang baik. Turki merupakan negara mayoritas Muslim pertama yang menyatakan kedaulatan Israel pada sekitar Maret 1949.

Hubungan Turki dan Israel secara historis terbentuk pada tahun 1949 dalam berbagai bidang, terkhusus bidang militer. Dinamika serta benturan antara Turki dan Israel mewarnai sejarah hubungan diplomatik tersebut. Pada awalnya Turki dan Israel memiliki hubungan yang baik dalam kerjasama di bidang militer. Pada tahun 1996, kedua negara menyetujui sebuah perjanjian yaitu *Military Training Cooperation Agreement (MTCA)* sebuah program kerjasama dalam bidang militer. Kerjasama ini mencakup protokol mengenai pertukaran perwira, kunjungan delegasi militer, pertukaran informasi, pelatihan militer tiga matra, serta pemberantasan terorisme dan penjagaan perbatasan.²

Selain adanya kerjasama di sektor ekonomi, pariwisata maupun militer, kedekatan hubungan antara Turki dan Israel juga disebabkan oleh adanya persamaan kepentingan masalah keamanan pada masa itu yaitu adanya musuh bersama, Suriah dan Iran. Konflik antara Turki dan Suriah menyangkut masalah sungai Tigris dan Eufrat yang berlangsung sejak tahun 1970 dan masalah partai *Kurdi Partai Pekerja Kurdistan atau Partiya Karkeren Kurdistan (PKK)*. Suriah dan Israel menghadapi masalah perbatasan Golan yang sempat dimediasi oleh

¹ Mazis, Ioannis Th. (2018). Turkey, Israel, Greece: Reshuffling in the Eastern Mediterranean

² Duman, Levent. (2020). Israeli-Turkish Rapprochement in the 1990s: Why an Alliance?

Turki. Sementara itu dengan Iran, Turki bersinggungan dengan masalah ideologi Turki yang menganut asas sekuler yang berlawanan dengan *teokratisme* Iran. Selain itu hubungan dekat antara Turki dengan Israel dan negara-negara barat sangat bertentangan dengan sikap Iran yang anti barat terutama Amerika Serikat dan Israel terkait permasalahan perdamaian di Palestina. Hubungan dekat antara Turki dengan Israel mendapat kecaman dari negara-negara Arab. Kecaman ini berkaitan dengan isu perdamaian Palestina yang hingga saat ini tidak menemukan kesepakatan damai.

Di era kepemimpinan Recep Tayyip Erdogan konflik Israel-Palestina menjadi fokus utama dalam kebijakan luar negeri *Neo-Ottomanisme* Turki di Timur Tengah yang mana secara historis, Palestina merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Kekaisaran Ottoman. Doktrin kebijakan luar negeri Ahmet Davutoğlu memiliki gagasan bahwa Turki memiliki posisi geografis yang strategis dan kekayaan warisan historis Kekaisaran Ottoman, sehingga Turki seharusnya meningkatkan peran dan pengaruh di kancah internasional, terutama dengan negara-negara bekas wilayah Kekaisaran Ottoman, seperti Timur Tengah, Balkan dan Asia Tengah.³ Pemerintah Turki berperan aktif dalam mendukung pembebasan Palestina serta mendapatkan pengakuan sebagai Negara berdaulat di PBB, hal ini ditunjukkan dengan aksi-aksi Turki seperti berperan aktif sebagai pemasok bantuan kemanusiaan di Gaza, mendesak serta berperan langsung dalam penyatuan kelompok Hamas dan Fatah di Palestina, mengkritisi tindakan Israel di Palestina.⁴

Dalam rentang waktu kurang lebih 20 tahun hubungan Turki dan Israel mengalami beberapa ketegangan akibat serangan militer Israel di Gaza. Puncak ketegangan diplomatik kedua negara terjadi pada tahun 2010, Turki memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel terkait insiden Mavi Marmara. Insiden Mavi Marmara adalah sebuah armada yang berlayar dari Siprus bersama dengan lima kapal lain yang mengangkut setidaknya 700 relawan yang berasal dari 36 Negara.⁵ Insiden penyerangan tersebut terjadi pada tanggal 31 Mei 2010 pukul 4 dini hari

³ Yansah, Savri. (2018). Pemikiran Politik Recep Tayyip Erdogan dan Perkembangannya di Turki

⁴ Iswan, Andi. (2018). Ambivalensi Kebijakan Politik Luar Negeri Turki di bawah Kepemimpinan Erdogan Terhadap Israel. Skripsi. Universitas Hasanudin.

⁵ IHH Humanitarian Relief Foundation. (2010). Mavi Marmara. <https://ihh.org.tr/en/news/mavi-marmara-557> diakses 28 September 2022

dan mengakibatkan 10 korban tewas dari kalangan sipil.⁶ Kapal yang mengangkut relawan *Free Gaza Movement* dan *Turkish Foundation for Human Rights* yang bertujuan untuk memberikan bantuan logistik bagi rakyat Gaza diserang oleh pasukan Israel sebelum sampai di Gaza. Insiden ini menjadi sorotan internasional karena menganggap Israel melanggar hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia.

Untuk mengurangi ketegangan antara Turki dan Israel setelah insiden Mavi Marmara, Perdana Menteri Benyamin Netanyahu berupaya meminta maaf ke Turki namun mendapatkan penolakan dari para pejabat Israel sehingga hal tersebut tidak dilakukan. Kemudian pada tahun 23 Maret 2013, atas desakan dari Presiden AS Barack Obama untuk memperbaiki hubungan Turki-Israel, Perdana Menteri Benyamin Netanyahu meminta maaf kepada Turki atas kematian armada tersebut dan berjanji untuk bertanggung jawab. Upaya normalisasi intensif tersebut menghasilkan tiga persyaratan Turki terhadap Israel; permintaan maaf secara resmi atas serangan terhadap Mavi Marmara, kompensasi finansial untuk para korban, dan mengakhiri pengepungan Israel di Jalur Gaza.⁷ Kesepakatan dalam draft normalisasi seperti permintaan maaf dapat diselesaikan oleh Israel, kecuali pada kesepakatan mengenai nominal kompensasi yang harus Israel berikan. Turki menuntut kompensasi terhadap korban yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nominal yang Israel siap bayar. Karena tidak tercapainya kesepakatan antara Turki dan Israel mengenai besaran nominal kompensasi yang harus diberikan kepada korban. Israel siap membayar USD 100.000 untuk setiap keluarga korban, namun Turki menuntut USD 1 juta untuk setiap keluarga korban sebagai biaya kompensasi. Dialog yang berakhir buntu berdampak pada merengangnya kembali hubungan kedua negara. Namun tiga tahun berselang, sikap Israel berubah drastis. Israel secara mengejutkan menyatakan siap membayar kompensasi korban dengan total sebesar USD 20 juta nominal yang jauh lebih besar jika di bandingkan dengan permintaan Turki pada maret 2013 lalu. Selain itu Perdana Menteri Netanyahu juga memberikan izin kepada Turki untuk mengirim semua bantuan ke Jalur Gaza dan

⁶ UN Report on The Israeli Attack on The Humanitarian Aid Convoy to Gaza, (Ankara: Turkish National Inquiry)

⁷ Bedir. Omer. (2020). The Flotilla Incident from the Perspective of International Law and the Judicial Right of the Victims

menjalankan proyek kemanusiaan di Jalur Gaza, seperti membangun rumah sakit, pembangkit listrik dan sebuah stasiun penyulingan air bersih.⁸

Setelah selama 6 tahun hubungan antara Turki dan Israel terputus, tepat tanggal 27 Juni 2016 kedua negara resmi membuka kembali hubungan diplomatik antar keduanya. Melalui dokumen perjanjian normalisasi hubungan diplomatik yang berjudul “*Procedural Agreement on Compensation Between the Republic of Turkey and The State of Israel*”, yang ditandatangani pada 28 Juni 2016. Perjanjian itu ditandatangani oleh Feridun Hadi Sinirlioğlu sebagai perwakilan Turki dan Dore Gold sebagai perwakilan Israel.⁹ Setelah menandatangani perjanjian, kedua negara langsung memulai proses normalisasi hubungan mereka dengan menunjuk Eitan Na'eh sebagai duta besar Israel untuk Ankara dan Mevin Mustafa Kemal Ökem sebagai duta besar Turki untuk Tel Aviv.

Pada tanggal 30 Maret 2018, rakyat Palestina melakukan demonstrasi atas pemindahan duta besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem. Pada unjuk rasa ini tentara Israel melemparkan tembakan yang menyebabkan 16 orang warga Palestina menjadi korban atas serangan tersebut. Atas peristiwa itu Presiden Erdogan merespon peristiwa yang terjadi dengan konferensi pers dan menyatakan bahwa Netanyahu adalah seorang teroris. Selanjutnya pada 17 April, Presiden Erdogan kembali mengancam untuk membatalkan normalisasi hubungan kedua negara tahun 2016 lalu. Hal ini dikarenakan tentara israel membunuh 17 warga Palestina di perbatasan Gaza. Tidak lama setelah itu kembali Israel membunuh 55 warga Palestina. Sejak protes dimulai pada 30 Maret, pasukan Israel telah menewaskan sedikitnya 214 warga Palestina dan melukai lebih dari 18.000 orang.¹⁰ Pada tanggal 14 Mei 2018, Presiden Erdogan mengumumkan penarikan Duta Besar

⁸ Barak Ravid. Israel-Turkey Reconciliation Talks Hit Impasse Over Scope of Compensation. <https://www.haaretz.com/israel-news/israel-turkey-reconciliation-talks-hit-impasse-over-scope-of-compensation.premium-1.526279?=&ts=1509266563116> diakses 28 September 2022

⁹ Procedural Agreement on Compensation Between the Republic of Turkey and The State of Israel diakses pada 21 Oktober 2022

¹⁰ Aljazeera. (2018). Gaza Protests: All the Latest Updates. <https://www.aljazeera.com/news/2018/11/12/gaza-protests-all-the-latest-updates> diakses 21 Oktober 2022

Turki untuk Israel melalui pidatonya di London, Inggris. Hal yang sama juga dilakukan Israel dengan menarik Duta Besar Israel dari Turki.

Krisis ekonomi yang melanda Eropa memberi dampak besar bagi perekonomian Turki hingga tingkat inflasi di Turki melonjak tajam. Nilai tukar mata uang Lira anjlok dan banyak investor yang menarik diri dari pasar Turki. Desakan bagi Erdogan untuk memperbaiki perekonomian Turki mulai diserukan oleh masyarakat. Selain itu, Turki merasa terancam dengan militan Kurdi di Suriah yang mendapatkan perlindungan dari Amerika Serikat. Kemudian Erdogan mulai berusaha untuk menormalisasikan hubungannya dengan negara-negara Arab dan juga Israel. Dialog mengenai normalisasi hubungan antara Turki dan Israel sudah berlangsung sejak akhir 2020 dan selesai pada agustus 2022. Melalui Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu yang mengatakan bahwa Turki dan Israel sepakat untuk menormalisasi dan merevitalisasi hubungan kedua negara. Pada tanggal 17 Agustus 2022, Turki dan Israel mengumumkan keputusan mereka untuk mengembalikan duta besar dan konsul jenderal mereka dan dengan demikian mencapai normalisasi penuh dalam hubungan mereka.¹¹

1.2 Identifikasi Masalah

Berpedoman pada latar belakang di atas maka identifikasi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa sejarah hubungan bilateral antara Turki dan Israel.
2. Bagaimana kondisi perekonomian Turki saat kepemimpinan Recep Tayyip Erdogan.
3. Apa kepentingan Turki dalam normalisasi hubungan antara Turki dan Israel pada tahun 2022.

1.3 Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya pembahasan kajian maka penelitian ini akan membatasi kepentingan Turki dalam normalisasi hubungan antara Turki dan Israel tahun 2022.

¹¹ The Institute for National Security Studies. Normalization between Turkey and Israel: Will it Last?. <https://www.inss.org.il/publication/turkey-israel-normalization/> diakses pada 21 Oktober 2022

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Apa kepentingan Turki dalam normalisasi hubungan dengan Israel tahun 2022”.

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah untuk:

1. Untuk mengetahui sejarah hubungan bilateral antara Turki dan Israel.
2. Untuk mengetahui kondisi ekonomi Turki saat kepemimpinan Recep Tayyip Erdogan.
3. Untuk mengetahui kepentingan apa saja yang di dapat Turki dalam normalisasi hubungan dengan Israel tahun 2022.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis

Penelitian diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah pemahaman terhadap ilmu Hubungan Internasional khusus mengenai normalisasi. Serta dapat memberikan wawasan pengetahuan mengenai hubungan diplomatic Turki dengan Israel.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam kajian selanjutnya. Serta diharapkan mampu menambah literatur di Perpustakaan FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta.